JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 3 No. 2, 2020, hal 373-389 ISSN 2746-3249

Pengaruh Inflasi ,Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Hidup Layak terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Provinsi Kalimantan Selatan

Influence Of The Inflation, Economic Growth And Decent Living Needs To Provincial Minimum Wages In The South Borneo Province

Sayyidah*, Muhammad Effendi
Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
*ssayyidah46@gmail.com

Abstract

This study aims to (1) determine the influence of the inflation, economic growth, and decent living needs simultaneously to Provincial Minimum Wages in the south Borneo Province; (2) find out the dominant factor in influencing Provincial Minimum Wages in South Borneo Province;

Purpose including in type purpose descriptive quantitative. While the location purpose is the province south Borneo, and the goal is inflation, economic growth, decent living needs, and provincial minimum wages in the South Borneo Province in 2004-2018. Data obtained will be analyzed by multiple linear regression using the Program Eviews version 10.

This study shows that the (1) Inflation, Economic Growth, and Decent Living Needs at the same time has a significant impact on Provincial Minimum Wages in the South Borneo Province in 2004-2018. (2) This study also indicates that Decent Living Needs is the dominant factor affecting Provincial Minimum in South Borneo Province in 2004-2018.

Keywords*: Inflation, Economic Growth, Decent Living Needs, and Minimum Wages.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak secara bersama (Simultan) berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi di Kalimantan Selatan; (2) mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan, dan objek penelitian ini yaitu data inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak dan Upah Minimum provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2004-2018. Data yang sudah diperoleh kemudian di olah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program Eviews versi 10.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2004-2018, (2) Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan hidup layak merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2004-2018.

Kata Kunci : Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Provinsi.

PENDAHULUAN

Tenaga kerja pada dasarnya merupakan pihak yang menawarkan jasa, serata mempunyai peran penting dalam keberlangsungan proses produksi, sehingga tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari perusahaan berupa penghasilan yaitu upah.

Upah minimum mempunyai tujuan dalam penetapan yaitu untuk meningkatkan upah bagi para tenaga kerja yang masih mendapatkan upah yang berada di bawah upah minimum dan bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh dari pengusaha atau perusahaan yang memberikan upah tidak layak kepada pekerjanya. Serta untuk meningkatkan daya beli bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kondisi perekonomian pada suatu daerah.

Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi, Dewan Pengupahan Nasional, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), mereka bertugas untuk mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah dapat dinaikan atau belum.

Di Indonesia Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahunya mempunyai besaran upah yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi perekonomian suatu Provinsi atau daerah, sama hal nya untuk di pulau Kalimantan Upah Minimum Provinsi (UMP) pun berbeda-beda, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Kalimantan
Tahun 2015-2018 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
1	2014	1.380.000	1.723.970	1.620.000	1.886.315	-
2	2015	1.560.000	1.896.367	1.870.000	2.026.126	2.026.126
3	2016	1.739.400	2.057.558	2.085.050	2.161.253	2.175.340
4	2017	1.882.900	2.227.307	2.258.000	2.339.556	2.354.800
5	2018	2.046.900	2.421.305	2.454.671	2.543.332	2.559.903

Sumber : BPS Indonesia dan Katalog Statistik Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa upah minimum provinsi yang terletak di pulau Kalimantan mengalami pengingkatan dari tahun 2014-2018. Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 2.454.671, berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur Rp 2.543.332 dan Provinsi Kalimantan Utara Rp 2.559.903, sedangkan untuk Upah Minimum Provinsi terendah di

Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 2.046.900. Peningkatan Upah Minimum Provinsi pada masing-masing Provinsi mempunyai selisih yang tergolong kecil pada setiap tahunnya.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masing-masing daerah di pulau Kalimantan memiliki tingkatan nominal upah yang berbeda-beda, ketentuan kenaikan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) tersebut tidak dapat disamaratakan, hal ini tergantung kondisi perekonomian suatu daerah dan kondisi dunia usaha suatu daerah tersebut.

Pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian ini adalah : (1) inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak (KHL) secara bersama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan (2) Faktor mana yang paling dominan mempengaruhi Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis secara bersama pengarh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan (2) Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sehingga menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam pembentukan Upah minimum provinsi di provinsi Kalimantan Selatan, bahwa terdapat pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak yang harus selalu diperhatikan keadaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Upah

Upah merupakan suatu imbalan jasa baik berupa uang atau barang yang didapatkan oleh seseorang dalam hubungan kerja, baik melalui perjanjian kerja serta imbalan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan kebutuhan keluarganya (Sukirno, 2002).

Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015, adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh yang dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja/buruh serta keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang akan atau telah dilakukan.

Upah Minimum

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah Minimum merupakan suatu standar minimum yang dipergunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada tenaga kerja yang mana berada pada lingkungan usaha atau kerjanya. Serta pemenuhan kebutuhan yang layak bagi tenaga kerja di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga hal itu disebut Upah Minimum Propinsi.

Inflasi

Menurut Sukirno (2015), Inflasi ialah sebagai suatu proses kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Inflasi Tarikan permintaan

   Inflasi seperti ini terjadi pada saat perekonomian sedang berkembang dengan pesat. Serta inflasi terjadi karena kesempatan kerja tinggi, sehingga tingkat upah yang juga tinggi akan membuat pengeluaran melebihi kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa, pengeluaran yang berlebihan tersebut menimbulkan inflasi.

2. Inflasi Desakan Biaya

   Inflasi ini biasanya berlaku pada saat perekonomian sedang berkembang dengan pesat, yaitu ketika tingkat pengangguran rendah, serta inflasi ini juga terjadi ketika perusahaan sedang menghadapi permintaan yang meningkat, sehingga terjadi kenaikan produksi dengan cara memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Hal tersebut membuat biaya produksi akan meningkat serta turunya produksi dan penurunan omset penjualan, yang akhirnya akan menyebabkan harga barang meningkat.

3. Inflasi Diimpor

   Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga-harga barang diimpor yang digunakan untuk produksi seperti bahan mentah untuk dalam negeri, maka kenaikan harga barang impor akan terjadi, serta berperan penting dalam kegiatan pengeluaran, yang nantinya secara tidak langsung akan berpengaruh kepada kenaikan biaya produksi dan kenaikan harga-harga di pasaran.

Pertumbuhan Ekonomi

Todaro (2003) menyebutkan bahwa ada tiga komponen atau faktor utama pada pertumbuhan ekonomi disetiap Negara yaitu akumulasi modal (semua jenis atau bentuk investasi yang ditanamkan pada sumber daya manusia, modal, tanah dan peralatan fisik), serta pertumbuhan penduduk yang akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, diiringi dengan kemajuan teknologi.

Solow (dalam Jhingan, 2013), Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi faktor terpenting bukan hanya pertambahan tenaga kerja dan modal, tetapi yang merupakan faktor terpenting adalah kemajuan pertambahan kemahiran tenaga kerja dan teknologi.

Kebutuhan Hidup Layak

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak dijelaskan bahwa Kebutuhan Hidup Layak atau disingkat KHL merupakan standar kebutuhan seorang buruh/teanga kerja lajang agar dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan dalam 1 (satu) bulan. Sedangkan jenis dan komponen kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu makanan & minuman (11 items), sandang (13 items), perumahan (26 items), pendidikan (2 items), kesehatan (5 items), transportasi (1 items) dan rekreasi dan tabungan (2 item).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Febrika Nurtiyas, (2016) dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014", menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja dan PDRB berpengaruh negatif terhadap upah minimum Porvinsi di Pulau Jawa, sedangkan pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap nilai Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa.

Peneliti Safrida Sofyan Dan Nura Syahriani (2014) dengan judul "Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi terhadap Inflasi dan Pasar Kerja Di Provinsi Aceh", menunjukkan bahwa upah minimum provinisi berdampakpada pengingkatan inflasi dan penawaran tenaga kerja, dan berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja di provinsi Aceh.

Peneliti Ninda Noviani Charysa (2013) dengan judul "Pengaruh Perumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regioal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011", menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap UMR, dan inflasi mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah.

Peneliti Ilham Kistanto (2013) dengan judul "Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupatan di Jember", menunjukan bahwa kebutuhan hidup layak berpengaruh signifikan dan positif, serata produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan dan positif terhadap UMK Jember, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap UMK Jember.

Peneliti M.Zahari MS (2014) dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi", menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMP Jambi dan inflasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap UMP Jambi.

Peneliti Luh Kertiasih (2017) dengan judul "Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015", menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap UMR di provinis Bali. Serta tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi tiak berpengarh signifikan secara simultan terhadap UMR di provinsi Bali pada tahun 2008-2015.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak dan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu penelitian 2004-2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan mendeskripsikan sutau peristiwa dan kejadian dengan data yang digunakan meliputi data tingkat inflasi, data pertumbuhan ekonomi, data kebutuhan hidup layak dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan (Sudjana dan Ibrahim 1989). Unit analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, yang mana kemudian data – data yang diambil pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang bersumber dari literatur – literatur (kepustakaan) serta data – data resmi yang telah diambi dari instansi pemerintah dan pihak yang mengelola yang berkaitan tentang judul penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Upah Minimum Provinsi merupakan pembayaran atas jasa fisik yang diterima oleh seorang pekerja yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara minimal. Dalam penelitian ini satuan Upah minimum Provinsi dinyatakan dalam Rupiah (Rp) per tahun.

Inflasi diakibatkan karena adanya kenaikan harga-harga umum dan terus menerus serta saling mempengaruhi pada barang lainya. Dalam penelitian ini satuan inflasi dinyatakan dalam persen (%) per tahun.

Pertumbuhan Ekonomi menjelaskan mengenai faktor- faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan bagaimana faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan ekonomi. Satuan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dinyatakan dalam persen (%) per tahun.

Kebutuhan Hidup Layak merupakan standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang pria/wanita untuk dapat hidup layak baik secara fisik, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Satuan kebutuhan hidup layak dalam penelitian ini dinyatakan dalam rupiah (Rp) per tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu (1) observasi dengan cara pengamatan dan pencatatan terkait data inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak dan upah minimum provinsi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan (Nawawi dan Martini, 1995). (2) Wawancara dengan staff Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provnsi Kalimantan Selatan serta serikat buruh dan pengusaha (Sugiyono, 2012). (3) Dokomentasi yaitu pengumpulan data dari berbagai data-data yang merupakan publikasi dari sumber-sumber buku dan jurnal, serta Publikasi dari Badan Pusat Statistik dan instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Teknik analisis data tebagi dari beberapa teknik analisis data untuk memecahkan rumusan masalah yang telah diajukan (1) menggunakan analisis deskriptif kuantitatif adalah statistik yang dipergunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan suau keadaan. (Sugiyono, 2012).

Analisis Regresi Linier Berganda

Mengunakan model analisis regresi linier berganda, analisis ini dipergunakan untuk melngetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang diformulasikan sebagai berikut: (Gujarati, 2012).

$$\mathbf{Y = \beta_o + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)}$$

Dari Fungsi diatas maka ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. Sehingga persamaannya menjadi seperti berikut:

$$\mathbf{\ln Y = \ln\beta_o + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \varepsilon \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)}$$

Dimana :

Y : Upah Minimum Provinsi di Kalimantan Selatan (Rp)

β0 : Konstanta

β1, β2, β3 : Parameter

X1 : Inflasi (%)

X2 : Pertumbuhan Ekonomi (%)

X3 : Kebutuhan Hidup Layak (Rp)

Ln : Logaritma Natural

ε : Error Tern

Uji F- Statistik

Digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terkait. pengujian ini menggunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan, yaitu apabila nilai probabilitas F kurang dari 0.05 (alpha 5%), maka Ho dapat ditolak dan apabila nilai F hitung > F tabel maka Ho juga ditolak. (Ghozali, 2005).

Uji T- Statistik

Menggunakan Uji t – Statistik, digunakan untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat. (Ghozali, 2005).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Detarminasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan presentasi pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus dari koefisien determinasi sebagai berikut : $K_d = r^2 \times 100\%$ (Sugiyono, 2012).

Keterangan :

K_d = nilai koefisien determinasi

R = nilai koefisien korelasi

Koefisien Korelasi (R)

Menggunakan model Koefisien Korelasi (R) metode ini digunkan untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel bebas dan vaiabel terkait. Maka dapat dihitung nilai koefisien korelasi (R) dengan mengakarkan nilai koefisien determinasi (R^2), $\sqrt{R}2$. (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN ANALISIS

Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Upah Minimum Provinsi

Tabel 2
Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2004-2018

No	Tahun	UMP (Rp)
1.	2004	482.200
2.	2005	536.300
3.	2006	629.000
4.	2007	745.000
5.	2008	825.000
6.	2009	930.000
7.	2010	1.024.500
8.	2011	1.126.000
9.	2012	1.225.000
10.	2013	1.337.500
11.	2014	1.620.000
12.	2015	1.870.000
13.	2016	2.085.050
14.	2017	2.258.000
15.	2018	2.454.671

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Bisa dilihat dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa bahwa terjadi kecenderungan peningkatan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu 2004-2018, dimana pada tahun 2004 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan UMP di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 482.200 jumlah ini

meningkat menjadi Rp 536.300 pada tahun 2005 atau naik sebesar Rp 54.100 dibandingkan tahun 2004.

Peningkatan UMP tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan terjadi pada tahun 2014 yakni mencapai Rp 282.500 per tahun. Sedangkan pada furmulasi perhitungan Upah Minimum Provinsi pada tahun 2015 mengalami perubahan furmula perhitungan UMP yang mengharuskan UMP dihitung dengan Inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan sebelum tahun 2015 penetapan UMP berdasarkan Kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi

Tabel 3
Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2004-2018

No	Tahun	Inflasi (%)
1.	2004	7.52
2.	2005	12.94
3.	2006	11.03
4.	2007	7.78
5.	2008	11.62
6.	2009	3.86
7.	2010	9.06
8.	2011	3.98
9.	2012	5.96
10.	2013	6.98
11.	2014	7.16
12.	2015	5.03
13.	2016	3.68
14.	2017	3.82
15.	2018	2.63

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan

Dari tabel 3 diatas diketahui bahwa inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan, inflasi yang paling tertinggi di atas 10% yaitu pada tahun 2005 (12,94 %), 2008 (11,62 %) dan 2006 (11,03 %), sedangkan untuk besaran inflasi yang berada di bawah 5% yaitu pada tahun 2011 (3,98 %), 2009 (3,86 %), 2017 (3,82 %), 2016 (3,68 %) dan tahun 2018 yaitu sebesar (2,63). Terjadinya peningkatan dan penurunan tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan disebabkan oleh kenaikan harga komodiatas terutama bahan pokok dipasaran terbatas

Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2004-20018

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.	2004	5.06
2.	2005	5.06
3.	2006	4.98
4.	2007	6.01
5.	2008	6.45
6.	2009	5.29
7.	2010	5.59
8.	2011	6.97
9.	2012	5.97
10.	2013	5.33
11.	2014	4.84
12.	2015	3.82
13.	2016	4.40
14.	2017	5.28
15.	2018	5.13

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan

Dalam Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2004 - 2018, yang mana pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 6,97%, sedangkan untuk nilai pertumbuhan ekonomi terendah berada pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,82 % per tahun. Sehingga dapat dilihat bahwa kenikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan selatan sangat lambat dan tidak stabil setiap tahunnya.

Kebutuhan Hidup Layak

Tabel 5
Kebutuhan Hidup Layak Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2004-2018

No	Tahun	Kebutuhan Hidup Layak (Rp)
1.	2004	503.775
2.	2005	503.775
3.	2006	684.319
4.	2007	768.000
5.	2008	790.000
6.	2009	947.000
7.	2010	997.000
8.	2011	1.053.379
9.	2012	1.227.000
10.	2013	1.227.547
11.	2014	1.555.000
12.	2015	1.691.000
13.	2016	1.826.762
14.	2017	1.889.730
15.	2018	1.971.243

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa cenderung terjadi peningkatan besaran nilia kebutuhan hidup layak di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2004-2018, namun besaran kebutuhan hidup layak di provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang relatif rendah, untuk peningkatan besaran kebutuhan hidup layak paling tinggi yaitu terjadi pada tahun 2014 yaitu dengan kenaikan sebesar Rp 327.425, sedangkan kenikan kebutuhan hidup layak yang paling rendah terjadi pada tahun 2013 yaitu dengan kenaikan sebesar Rp 547.

Sedangkan untuk tahun 2015-2018 besaran nilai kebutuhan hidup layak tidak lagi dilakukan survey setiap tahunnya melainkan nilai kebutuhan hidup layak ditinjau setiap 5 tahun sekali, hal ini karena pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Upah Minimum Provinsi dihitung mengunkaan formulasi baru. Pada tahun 2015 formula perhitungan Upah minimum Provinsi yaitu dengan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Serta Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 21 tahun 2016, komponen dan jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali, hal ini yang menyebabkan besaran nilai KHL pada tahun 2015-2018 tidak lagi memalui survey melainkan melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.

Analisis Data

Regresi Linier Berganda

Setelah dilakukan perhitungan regresi menggunakan bantuan program Eviews 10, maka diperoleh hasil perhitungan penelitian sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.506291	0.944643	-1.594562	0.1391
INFLASI	-0.025692	0.052076	-0.493351	0.6315
PEREKONOMI	-0.001357	0.119263	-0.011376	0.9911
KHL	1.115741	0.057136	19.52794	0.0000
R-squared	0.988914			
Adjusted R-squared	0.985890			
F-statistic	327.0726			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 6 diatas diketahui nilai koefisien regresi untuk setiap varibel penelitian dapat dirumuskan melalui model regresi estimasi sebagai berikut :

$$\hat{Y} = -1.506291 - 0.025692X_1 - 0.001357X_2 + 1.115741X_3$$

Uji F – Statistik

Setelah dikakukan pengujian dengan menggunakan software Eviews 10, maka terlihat hasil nilai Probabilitas adalah 0.0000. karena nilai prob F < alpha, yaitu 0.0000 < 0,05, yang artinya bahwa variabel independent (inflasi, pertumbuhan eknomi dan kebutuhan hidup layak) berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2004-2018. Maka dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan H_1 diterima, artinya menujukkan bahwa variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak secara bersama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Uji T – Statistik

Berdasarkan tabel 6 di atas, bisa kita lihat bahwa tingkat signifikansi, untuk variabel inflasi mempunyai nilai signifikansi 0.6315. Pada penelitian ini alpha yang digunakan yaitu 5% (0,05). Variabel Inflasi mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan alpha (0,05 < 0.6315). Untuk variabel pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa nilai probabilitas 0.9911, hal ini membuat nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi lebih besar dari alpha (0,05 > 0.911), Sedangkan untuk variabel kebutuhan hidup layak terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0.0000, pada penelitian ini alpha yang digunakan yaitu 5% (0,05) maka nilai 0.0000 < 0,05.

Berdasarkan hasil regresi diatas dapat disimpulkan bahwa variabel kebutuhan hidup layak memiliki nilai probabilitas yang lebih mendekati 0, maka dapat diketahui bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi Upah Minimum Provinsi yaitu variabel kebutuhan hidup layak (X3) di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2004-2018.

Koefesien Determinasi (R^2)

Setelah melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi Eviews 10, dilihat pada tabel 6 di atas menunjukkan nilai Koefesien determinasi (R^2) yang diperoleh dari hasil estimasi adalah sebesar 0.985890. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel-variabel bebas: inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait dalam hal ini adalah

Upah Minimum Provinsi. Hal tersebut ditunjukkan hasil regresi pada R-squared sebesar 0.985890 atau 98.5%, sedangkan 0.01411 atau 1,4% dipegaruhi oleh variabel lain di luar model.

Koefesien Korelasi (R)

Perhitungan nilai koefisien korelasi (R) adalah dengan mengakarkan nilai dari koefisien determinasi (R^2), maka dapat dihitung nilai koefisien korelasi sebesar $\sqrt{0.985890}$ = 0.9929199363.

Nilai koefisien korelasi sebesar 0.9929199363, artinya pengaruh variabel bebas inflasi (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), kebutuhan hidup layak (X3) dan variabel terikat Upah Minimum Provinsi (Y) dalam penelitian memiliki pengaruh yang sangat kuat.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini yaitu menentukan seberapa besar pengaruh dari variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak terhadap upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan, serata ntuk menentukan kebijakan dalam pembentukan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2004-2018.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu mengenai birokrasi atau izin permohonan bantuan data dan wawancara dengan pemangku kebijakan oleh pihak terkait terutamanya pada instansi pemerintahan yang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lumayan lama oleh instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Hasil penelitian ini secara bersama (simultan) memiliki pengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu penelitian selama 15 tahun, dari tahun 2004-2018. (2) variabel kebutuhan hidup layak (KHL) merupakan faktor yang paling dominan dalam

mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan Selama tahun 2004-2018.

Saran

Saran-saran yang dikemukakan penulis yaitu (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lebih memperhitungkan berbagai faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum provinsi, serta diharapkan dalam menetapkan upah minimum provinsi memperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak, agar dapat terciptanya kesejahteraan bagi tenaga kerja dan kelangsungan usaha bagi perusahaan. (2) Kondisi perekonomian suatu daerah harus selalu di perhatikan agar pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dalam keadaan yang baik dan stabil. Sehingga tidak terjadi tuntutan mengenai Upah Minimum oleh tenaga kerja. (3) Kondisi dunia usaha, sangat penting diperhatikan dalam rangka pembentukan dan penetapan upah minimum provinsi, sehingga dapat mendorong kesejahteraan para tenaga kerja, melalui perbaikan tingkat upah minimum provinsi. (4) Pemerintah diharapkan memasukkan kembali besaran kebutuhan hidup layak dalam formulasi pembentukan upah minimum provinsi. Serta lebih memperhatikan item-item yang ada di komponen kebutuhan hidup layak. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar merevisi kebijakan komponen kebutuhan hidup layak. Karena di Provinsi Kalimantan selatan sendiri variabel kebutuhan hidup layak merupakan variabel paling dominan mempengaruhi upah minimum provinsi. (5) Pengusaha diharapkan dapat memberikan intensif/bonus serta upah layak bagi tenaga kerjanya, dan pemberian upah harus di atas dari Upah Minimum Provinsi atau sama dengan besaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga membuat tercapainya produktivitas bagi tenaga, karena dengan naiknya upah minimum provinsi dihaparkan buruh dapat bekerja lebih baik dan lebih produktif. (6) Bagi Tenaga kerja diharapkan dapat bekerja atau memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan, karena dengan begitu kemungkinan besar perusahaan akan memberikan intensif/ bonus kepada tenaga kerjanya, dan perusahaan tidak akan memberikan upah yang rendah atau dibawah upah minimum provinsi, sehingga kebutuhan hidup para pekerja setiap tahunnya dapat terpenuhi dan kesejahteraan dapat tercapai. (7) Sehingga jika kebijakan mengenai Upah Minimum Provinsi sudah menjadi kesepakatan baik oleh teanga kerja atupun pengusaha, maka kebijakan tersebut harus dijalankan serta tidak ada yang

melanggar kebijakan tersebut. (8) Serta dibutuhkan ketentuan hukum yang mengatur tentang sangksi-sangksi bagi yang melanggar ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan selatan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini. (9) Birokrasi mengenai permohonan bantuan data dan wawancara kepada pemangku kebijakan serta ketersediaan data haruslah dipermudah oleh instansi-intsansi terkait, khususnya instansi pemerintahan.

Bibliography

Badan Pusat Statistik, (2018). *Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan*. Kalimantan Selatan.

Badan Pusat Statistik, (2018). *Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan*. Kalimantan Selatan.

Badan Pusat Statistik, (2018). *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan*. Kalimantan Selatan.

Badan Pusat Statistik, (2015). *Kebutuhan Hidup Layak Kalimantna Selatan*. Indonesia.

Charysa, Ninda Noviani. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal*.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Denga Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D., & Porter, d. D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika.* Jakarta: Salemba Empat.

Jhingan, M.L. (2013). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. Rajawali Pers.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 Tentang *kebutuhan hidup layak.*

Kertiasih, Luh (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadapa Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha.*

Kistanto, Ilham. (2013). *Analisis Penetapan Upah Minimum di Jember*. [Skripsi] Jamber. Fakultas Ekonomi , Universitas Jember.

Nawawi dan Martini, (1995). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Nurtiyas, Febrika. (2016). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2014.* [Skripsi]. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang *Pengupahan* .

Safrida, Sofyan dan Syahriani. (2014). Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi Dan Pasar Kerja Di Provinsi Aceh. *Jurnal Agrisep.*

Sudjana, Nana dan Ibrahim. (1989). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung. Sinar Baru.

Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sukirno, Sadono. (2002). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Todaro dan Smith, (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. United Kingdom. Pearson Education Limitied.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Zahari. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari.*